

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Auditor secara umum merupakan seseorang yang menyatakan suatu pendapat mengenai suatu laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, dalam hal kewajaran yang sifatnya material, posisi keuangan serta arus kas yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Saat ini banyak auditor yang menjadi perhatian publik terkait kasus-kasus yang terjadi yang berhubungan dengan profesinya, tak terkecuali auditor pemerintah.

Auditor pemerintah merupakan auditor yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas utamanya untuk melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang telah unit-unit organisasi atau entitas pemerintahan sajikan atau pertanggungjawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah (Widiyastuti dan Pamudji, 2009). Oleh karena itu auditor pemerintah merupakan pihak yang sangat berperan penting dalam pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara, seorang auditor harus membuktikan profesionalismenya dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan.

Auditor pemerintah dibagi menjadi dua, yang pertama auditor eksternal dan yang kedua auditor internal. Di Indonesia yang terdapat auditor eksternal adalah Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), dan auditor internal atau yang disebut Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat. Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008, BPKP

merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan yang berwenang melaksanakan tugas pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan BPK menurut Undang-Undang No.15 Tahun 2006 pasal 1 adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan pasal 2 dan 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tugas dan fungsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah melakukan audit, revidi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi yang termasuk dalam badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah.

Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (IAPPI,2011) telah dijelaskan bahwa auditor bertanggung jawab dalam merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh ketetapan yang sesuai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. Seperti halnya Kasus kecurangan yang semakin banyak terjadi. Kasus ini merupakan salah satu permasalahan yang bukan hanya dihadapi oleh negara maju tetapi negara berkembang contohnya negara indonesia juga banyak mengalami kasus kecurangan. Kasus kecurangan ini biasanya terjadi akibat dari kondisi perekonomian yang semakin sulit beberapa tahun terakhir. Dengan bermacam cara yang terus

berkembang pasti kemampuan auditor dalam menjalankan atau melaksanakan tugasnya untuk mendeteksi kecurangan juga perlu terus ditingkatkan, bagaimanapun juga auditor harus mampu mendeteksi kecurangan apabila terjadi kecurangan dalam melaksanakan tugas auditnya (Anggriawan, 2014).

Kecurangan secara umum merupakan tindakan yang melawan hukum yang secara sengaja dilakukan untuk tujuan pribadi atau kelompok, dengan niat demi mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok yang secara langsung dapat merugikan pihak lain. Kecurangan yang sering terjadi adalah dengan memanipulasi laporan keuangan yang menyebabkan salah saji yang material dalam laporan keuangan dimana laporan keuangan merupakan subjek utama dalam audit.

Istilah kecurangan (*fraud*) berbeda dengan kekeliruan (*errors*) (Suryo, 1999: Setiawan, 2003). Faktor utama yang membedakan antara kecurangan dengan kekeliruan adalah tindakan yang mendasarinya, apakah tindakan tersebut dilakukan secara sengaja atau tidak. Apabila tindakan tersebut dilakukan secara sengaja, maka disebut kecurangan (*fraud*) dan apabila tindakan tersebut dilakukan tidak secara sengaja, maka disebut kekeliruan (*errors*).

Untuk mendukung kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan yang mungkin terjadi dalam melakukan tugas auditnya, auditor harus mengerti dan bisa memahami kecurangan, jenis, karakteristik, dan cara untuk mendeteksinya atau yang sering disebut dengan *red flags* (Widiyastuti, 2009). *Red flags* merupakan suatu kondisi yang janggal atau berbeda dari keadaan sebenarnya. Dengan kata lain *red flags* merupakan suatu indikasi akan adanya sesuatu yang tidak normal yang akan memerlukan pemeriksaan selanjutnya (Sitinjak, 2008 dalam Widiyastuti, 2009). Timbulnya *red flags* tidak selalu menunjukkan adanya tanda-

tanda kecurangan, tetapi *red flags* biasanya timbul disetiap kasus kecurangan yang terjadi sehingga dapat menjadi tanda peringatan bahwa kecurangan terjadi (Amrizal, 2004).

Sebagai auditor dalam menjalankan tugasnya khususnya dalam mendeteksi kecurangan harus didukung oleh sikap kompetensi, independensi, profesionalisme dan pengalaman. Setiap auditor perlu memiliki kemampuan tersebut untuk menemukan adanya tanda-tanda kecurangan yang mungkin terjadi. Sikap-sikap ini yang terdapat dalam standar atribut auditing pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI). Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) menjelaskan bahwa sikap seorang auditor yang berkenaan dengan pribadinya adalah kompetensi (keahlian dan pelatihan teknis), independensi, dan skeptisme profesional. Oleh sebab itu auditor harus mempunyai sikap-sikap tersebut agar tidak gagal dalam mendeteksi adanya indikasi kecurangan.

Kompetensi merupakan kemampuan seorang auditor untuk menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang sudah dimilikinya selama melaksanakan audit sehingga auditor dapat melakukan audit dengan teliti, cermat, dan objektif (Carolita dan Rahardjo, 2012 dalam Muhammad,2015). Dalam melaksanakan tugasnya auditor wajib memiliki pendidikan, pengetahuan, keahlian dan keterampilan, pengalaman serta kopetensi lain yang dibutuhkan untuk melakukan tanggung jawabnya.(SAIPI;2013).

Selain kompetensi, sikap independensi juga perlu dimiliki oleh auditor. Independensi merupakan kebebasan dari suatu kondisi yang mengancam kemampuan aktivitas audit intern untuk melakukan tanggung jawab audit intern secara objektif (SAIPI;2013). Oleh sebab itu, independensi merupakan sikap yang tidak mudah dipengaruhi, dan tidak akan memihak kepada siapapun. Akuntan publik tidak membenarkan untuk memihak kepentingan siapapun.

Akuntan publik mempunyai kewajiban untuk bersikap jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, tetapi juga kepada kreditur dan pihak lain yang menaruh kepercayaan atas pekerjaan akuntan publik (Ardini,2010 dalam Muhammad,2015)

Sikap lainnya yang harus dimiliki auditor adalah sikap profesionalisme. Dengan sikap ini auditor diminta untuk memiliki keterampilan umum yang dimiliki auditor pada umumnya dan merencanakan serta melaksanakan pekerjaan menggunakan keterampilan dan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama. (Widiyastuti, 2009). Penggunaan kesiapan profesional menekankan tanggung jawab setiap Auditor untuk memperhatikan Standar Audit serta mempertimbangkan penggunaan audit berbasis teknologi dan teknik analisis data lainnya (SAIPI;2013).

Sikap terakhir yang harus dimiliki oleh seorang auditor adalah pengalaman. Pengalaman kerja merupakan faktor penting dalam memprediksi kinerja auditor, sehingga pengalaman dimasukkan sebagai salah satu persyaratan dalam memperoleh izin menjadi akuntan indonesia berdasarkan SK MenKeu No. 17/PMK.01/2008. Yang dapat menentukan Kesiapan auditor dalam melakukan audit tidak hanya pengetahuan yang diperoleh selama pendidikan saja tetapi juga tidak kalah pentingnya adalah pengalaman yang diperoleh selama melakukan pemeriksaan.

Pengalaman merupakan keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh seseorang setelah mengerjakan sesuatu hal. Pengalaman seorang auditor akan terus meningkat seiring dengan berjalannya waktu untuk melakukan audit serta semakin kompleksnya transaksi keuangan perusahaan yang diaudit agar memperluas pengetahuan dibidangnya (Carolita dan Rahardjo, 2012 dalam Muhammad, 2015).

Menurut penelitian yang dilakukan Widiyastuti dan Pamudji (2009) tentang pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Profesionalisme terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*), kesimpulan dari penelitian tersebut bahwa Kompetensi, Independensi, dan Profesionalisme berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*). Variabel pertama kompetensi, kompetensi berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*). Hal ini berdasarkan hasil pengujian nilai t statistik variabel kompetensi sebesar 2,376 yang lebih besar dari 1,96 dan nilai koefisien parameter yang positif (0,275), variabel kedua independensi, independensi berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*) hal ini terlihat pada nilai t statistik yang lebih besar dari 1,96 yaitu 2,87 dan nilai koefisien parameter yang positif (0,289) dan variabel terakhir yaitu variabel Profesionalisme, Profesionalisme berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*) hal ini berdasarkan hasil pengujian nilai t statistik lebih besar dari yang disyaratkan (1,96) yaitu hanya sebesar 4,204 dan nilai koefisien parameter yang positif (0,298).

Peneliti memilih auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatra Barat sebagai objek penelitian dibandingkan dengan lainnya karena sesuai dengan instruksi Presiden No 4 tahun 2011 tentang percepatan peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan, serta mengakomodir kebutuhan pemerintah daerah akan peran BPKP. Pernyataan ini tentu menuntut seorang auditor di BPKP untuk menyajikan kualitas audit yang baik agar dapat mendeteksi kecurangan yang dapat dipercaya secara kualitas. Tentu dengan hal tersebut seorang auditor harus memiliki kinerja yang baik untuk mewujudkannya. Karena itu peneliti tertarik meneliti di BPKP perwakilan Provinsi Sumatra

Barat untuk melihat apakah ada pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Profesionalisme dan Pengalaman Auditor dalam mendeteksi Kecurangan (*fraud*) yang ada di BPKP sehingga untuk mengetahui apakah ada hubungannya atau tidak.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Widiyastuti dan Pamudji (2009) yang menguji kompetensi, independensi, profesionalisme, terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Peneliti menambahkan variabel pengalaman auditor karena pengalaman auditor yang dinilai menjadi variabel yang berpotensi untuk menguji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan auditor dalam mendeteksi gejala dan fenomena kecurangan. Dari penelitian yang dilakukan oleh Suryani dan Hervinda (2016) bahwa pengalaman dan keahlian audit (secara persial) yang secara statistik teruji memiliki pengaruh terhadap pendeteksian kecurangan (*fraud*) oleh auditor dikarenakan suatu tugas audit memang harus dilakukan oleh seorang auditor yang memiliki pengalaman dan keahlian audit. Hal ini sejalan dengan berbagai teori yang mengatakan bahwa dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, akuntan wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama (SPAP, PSA No 04, 2011). Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa auditor harus menggunakan kemahiran profesionalnya diantaranya adalah pengalaman dan keahlian audit yang dimiliki auditor. Peneliti ini atas dasar penelitian mengenai kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan dan penelitian akan masalah kecurangan (*fraud*) masih perlu dikembangkan di Indonesia atas maraknya beberapa kasus yang melibatkan auditor di Indonesia.

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi, independensi, profesionalisme, dan pengalaman auditor terhadap auditor dalam mendeteksi kecurangan. Oleh karena itu peneliti mengambil judul **“Pengaruh Kompetensi, Independensi,**

profesionalisme, dan pengalaman auditor dalam mendeteksi kecurangan” (Studi empiris pada BPKP perwakilan Provinsi Sumatra Barat)

I.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dibahas pada latar belakang, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan?
2. Apakah independensi berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan?
3. Apakah profesionalisme berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan?
4. Apakah pengalaman auditor berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mengenai pengaruh kompetensi, independensi profesionalisme dan pengalaman auditor terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan
2. Untuk mengetahui mengenai pengaruh kompetensi terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan
3. Untuk mengetahui mengenai pengaruh independensi terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan

4. Untuk mengetahui mengenai pengaruh profesionalisme terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan
5. Untuk mengetahui mengenai pengaruh pengalaman auditor terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Sebagai bahan penyusun skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh derajat kesarjanaan jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi

2. Bagi Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

Bagi kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sumatra Barat Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk dapat menjadikan bahan masukan perusahaan khususnya dalam meningkatkan pendeteksian kecurangan dimasa mendatang

3. Bagi akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya pada bidang yang sama dan sebagai kontribusi untuk pengembangan ilmu audit.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun agar penulisan yang dilakukan menjadi lebih terarah. Penulisan ini terdiri dari 5 bab yaitu pendahuluan, landasan teori, tinjauan kajian terdahulu,

pengembangan hipotesis, metode penelitian, analisis data, pembahasan hasil penelitian dan kesimpulan serta keterbatasan saran.

Pada bab satu terdapat penjelasan mengenai latar belakang penelitian yang dilakukan. Setelah penjelasan mengenai latar belakang masalah dapat dirumuskan pada subbab perumusan masalah. Setelah masalah dirumuskan maka dapat dijelaskan mengenai tujuan penelitian. Penjelasan mengenai manfaat penelitian dijabarkan setelah tujuan penelitian ditetapkan.

Pada bab dua dijelaskan mengenai teori yang mendasari penelitian digunakan untuk membangun hipotesis. Hipotesis yang dibangun didukung dengan hasil penelitian terdahulu. Teori yang mendasari penelitian, hipotesis yang dibangun serta hasil penelitian terdahulu dijelaskan pada bab dua yaitu: landasan teori, tinjauan kajian terdahulu dan pengembangan hipotesis.

Pada bab tiga menjelaskan mengenai metodologi penelitian. Penjelasan bab ini diawali dengan penentuan responden dan teknik pengambilan sampel. Setelah sampel ditentukan maka ditetapkan metode pengumpulan data. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan lebih lanjut dalam operasionalisasi variabel yang menjelaskan mengenai indikator yang digunakan untuk mengukur setiap variabel. Selanjutnya penjelasan mengenai metode analisis data yang menjelaskan model analisis data yang digunakan serta pengujian yang dilakukan. Pengujian tersebut baik terhadap data yang digunakan maupun terhadap metode analisis data.

Pada bab empat disajikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Pada bagian hasil penelitian dijelaskan hasil analisis pengujian hipotesis dan menyatakan apakah hipotesis

diterima atau ditolak. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan hasil pengujian hipotesis. Pada sub bagian pembahasan ini, diuraikan secara lebih luas dan mendalam serta berbagai justifikasi atas hasil hipotesis yang diterima dan sebaliknya memberikan berbagai argumen atau kenapa hipotesis ditolak. Pembahasan ini menggunakan dasar berupa: landasan teoritis, tinjauan kajian terdahulu, kondisi lingkungan saat penelitian dilakukan serta logika rasionalitas. Dan terakhir juga dijelaskan beberapa keterbatasan kalau ada, implikasi hasil penelitian serta beberapa saran untuk kajian lanjut.

Bab lima merupakan bab penutup, yang pada dasarnya berisi ringkasan atas hasil pembahasan penelitian yang sudah diuraikan secara panjang lebar dan mendalam pada bab terdahulu. Secara rinci terdiri dari kesimpulan, keterbatasan penelitian, implikasi dan saran-saran untuk kajian lanjut.

